



Judul : DPR Belum Sepakat Bahas RUU Cipta Kerja
Tanggal : Rabu, 26 Februari 2020
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 3

DPR Belum Sepakat Bahas RUU Cipta Kerja

JAKARTA—Pimpinan DPR mengakui pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) sulit dimulai pada akhir masa sidang ini. Pasalnya, di internal pimpinan sendiri belum sepakat untuk segera membahas RUU sapu jagat itu.

"Susah, karena pimpinan yang lain belum menyepakati, masih menunggu. Ya, sudah dilanjutkan masa sidang besok setelah tanggal 23 Maret," kata Wakil Ketua DPR Korpolkam Azis Syamsuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Soal usulan untuk mengembalikannya draf RUU Ciptaker karena banyak salah pengetikan, Azis tidak sepakat karena proses pembahasan belum berjalan dan belum dibahas juga dalam rapat pimpinan (rapim) serta Badan Musyawarah (Bamus) dan belum ada mandat kepada AKD (alat kelengkapan dewan). Jadi, bagaimana mengembalikannya RUU itu ke pemerintah.

"Kalau saya tidak sependapat, bahas saja nanti sekalian. Yang penting *kan* substansi. Kalau substansinya memang sama kenapa harus diputar-putar," ujar Azis.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu, kalau drafnya dikembalikan, itu hanya akan menghabiskan waktu karena membuat prosesnya menjadi lebih lama dan berliku. Dan, DPR semestinya ikut menciptakan visi Indonesia Maju dengan efisien.

"Menghabiskan waktu juga, kita harus ciptakan Indo-

nesia Maju dengan efisien dan efektif. Jangan menciptakan hal-hal mutar-mutar, ruwet," tandasnya.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR tidak mau terburu-buru membahas RUU lintas sektoral itu. Sementara itu, masyarakat masih menelaah pasal per pasal RUU tersebut. "Kita punya mekanisme dan sekarang ini baru satu minggu setelah draf Omnibus Law terkait Ciptaker diberikan. Masyarakat juga baru melihat satu per satu, pasal per pasalnya," kata Puan.

Puan menjelaskan, dalam RUU Ciptaker ini termuat 15 bab dan 179 pasal yang tertulis dalam 1.028 halaman. Dengan begitu, pihaknya tidak mau terburu-buru karena masyarakat juga belum mengetahui secara keseluruhan isi dari RUU tersebut. "Jangan sampai apa yang kami bahas, sementara masyarakat belum tahu apa yang mau dibahas. Ini pasti akan menimbulkan kegaduhan dan tentu saja menimbulkan mispersepsi," ujarnya.

Karena itu, politikus PDIP ini mengajak semua pihak untuk secara jernih menelaah pasal per pasal dari RUU tersebut. DPR, kata dia, juga ingin

melibatkan elemen masyarakat dalam pembahasannya. "Jadi, setiap elemen yang punya kepentingannya silakan bicara, kita sosialisasikan, diskusi dulu, dan kemudian kita *ikutin* mekanismenya yang ada," ajak Puan.

Terlebih, mantan menko PMK ini juga menilai bahwa sosialisasi pemerintah terkait RUU ini belum maksimal sehingga DPR dan pemerintah bersepakat untuk bersamasama menyosialisasikan RUU ini. "Belum maksimal, kami sudah bersepakat bahwa DPR bersama pemerintah akan sama-sama menyosialisasikan," ucapnya.

Puan menambahkan, DPR juga tengah membentuk tim guna melihat dalam memilah pasal mana saja yang dianggap penting, khususnya substansi yang dinilai merugikan pihak tertentu. "Kita sama-sama jernih hati dan jernih pikiran. Yang penting bermanfaat bagi masyarakat," terangnya.

Soal kesalahan pengetikan dan permintaan agar dikembalikan ke pemerintah, menurut Puan tidak perlu dikembalikan ke pemerintah karena nantinya RUU itu akan dibahas lagi di DPR. "Kan pemerintah sudah mengatakan itu salah ketik. Ini kan masih draf, jadi memang tidak perlu kami kembalikan, tapi nanti bicarakan lagi di sini," tandasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP PKB Ida Fauziyah mempersilakan publik untuk mengakses dan membahas isi RUU tersebut melalui berbagai media. "Input dan pandangan masyarakat yang mendukung atau menolak bisa mewarnai

proses ini. Memang beginilah demokrasi," tutur Ida Fauziyah yang juga Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (20/2).

Menyangkut sikap PKB terhadap Omnibus Law RUU Ciptaker ini, Ida Fauziyah menyatakan bahwa PKB mendukung setiap upaya terobosan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja. "Konstituen kami rata-rata adalah petani dan pemilik usaha kecil di desa dan perkotaan. RUU ini menyediakan perlindungan dan penguatan bagi UMKM, baik dari segi permodalan, akses kredit, pemasaran, sampai pelatihan. Akan baik sekali bila ada UU yang bisa mempermudah itu semua," katanya.

Sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah, lanjut Ida Fauziyah, PKB akan mendorong agar anggota Fraksi PKB di DPR membantu menyempurnakan RUU ini agar betul-betul hasilnya nanti bisa bermanfaat bagi rakyat. "RUU Cipta Kerja ini merupakan bagian terpenting dari upaya pemerintah untuk menggerakkan sektor usaha agar dapat lebih maksimal menyerap tenaga kerja," tuturnya.

Menurutnya, RUU Ciptaker sebagai upaya pemerintah dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia. Pemerintah dan DPR masih membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk membahas pasal-pasal ketenagakerjaan dalam RUU tersebut. "Saya mohon kepada teman-teman ayo ruang dialog dibuka," kata politikus senior PKB ini.

□ **kiswondari**